

BAB II

EVOLUSI HUBUNGAN TAIWAN-CHINA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KALKULASI KEAMANAN KEDUA AKTOR

Posisi Taiwan dan China dalam sistem internasional dipengaruhi oleh evolusi dan dinamika hubungan di lintas Selat Taiwan sebagai suatu konstruksi struktural untuk memahami transformasi strategi keamanan Taiwan khususnya pada periode 2020-2024. Bab ini menempatkan hubungan Taiwan-China sebagai hasil dari proses historis, dinamika politik, serta kerangka kebijakan yang berkembang sejak berakhirnya Perang Saudara Tiongkok hingga periode kontemporer. Dengan demikian, pembahasan bab II yang berfungsi sebagai landasan analitis untuk memahami situasi keamanan di Selat Taiwan terbentuk dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Struktur yang pembahasan tersusun menjadi tiga bagian utama yaitu: (1) Perkembangan hubungan lintas Selat Taiwan; (2) Posisi kedua aktor dalam sistem internasional dengan menyoroti kepentingan strategis China terhadap Taiwan serta perkembangan status Taiwan dalam tatanan internasional; (3) *One China Policy* sebagai instrumen penting dalam dinamika hubungan lintas Selat Taiwan.

2.1. Perkembangan Hubungan Lintas Selat Taiwan

Hubungan lintas Selat Taiwan merupakan hasil dari proses historis dan dinamika politik yang berkembang sejak berakhirnya Perang Saudara pada 1949. Terbentuknya dua entitas politik yang terpisah menandai dimulainya hubungan lintas selat yang kompleks, diwarnai dengan klaim kedaulatan yang saling bertentangan.

Sejak awal, relasi keduanya tidak berkembang dalam kerangka hubungan antarnegara yang normal, melainkan sebagai hubungan konflik internal yang "tereksternalisasi" ke dalam sistem internasional. Separasi yang terjadi di lintas Selat Taiwan tidak hanya mencerminkan perpecahan teritorial, tetapi juga menciptakan ambiguitas status hukum dan politik yang berkelanjutan dalam hubungan kedua pihak (Gazzini, 1996).

Perkembangan hubungan lintas Selat Taiwan kemudian menunjukkan pola yang tidak linier dan mengalami beberapa fase perubahan yang mencerminkan pergeseran pola interaksi dari konfrontasi terbuka menuju stabilisasi yang terbatas, serta kembali mengalami ketegangan. Dinamika ini mencerminkan bahwa hubungan Taiwan-China juga dipengaruhi oleh kalkulasi politik dan keamanan yang selalu berkembang (Sheng, 2008). Hal ini ditunjukkan pada fase awal pasca perang saudara, interaksi didominasi oleh konflik militer yang seiring konsolidasi internal berubah oleh pengaruh pertimbangan strategis yang lebih luas, termasuk kebutuhan stabilitas regional dan kepentingan pembangunan nasional. Dengan demikian, hubungan lintas Selat Taiwan dapat dipahami sebagai relasi yang terus mengalami perkembangan dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi domestik dan internasional, tanpa sepenuhnya keluar dari bayang-bayang konflik kedaulatan.

2.1.1. Latar Historis Klaim Separasi Taiwan-China

Klaim separasi politik Taiwan dan China berakar pada berakhirnya Perang Saudara Tiongkok (1927-1949), ketika Partai Komunis China menguasai daratan dan mendirikan *People's Republic of China* (PRC), sementara pemerintah *Republic of China* (ROC) mempertahankan

eksistensinya di Taiwan. Perang Saudara yang meletus pada 1927 dipicu oleh runtuhnya kerja sama yang rapuh antara Kuomintang (KMT) dan *Chinese Communist Party* (CCP), setelah terjadinya penumpasan terhadap unsur-unsur komunis di Shanghai. Pada periode ini, opini internasional terhadap CCP adalah sebagai aktor non-negara yang bersifat sementara dan belum mampu menantang otoritas pemerintahan KMT secara serius (Fairbank, 2012). Pemerintah KMT menyebut CCP sebagai kelompok “bandit” dan masih dipersepsikan sebagai gerakan pemberontak dengan kapasitas terbatas tanpa struktur kenegaraan yang jelas. Namun, persepsi tersebut mulai berubah seiring dengan proses konsolidasi teritorial yang dilakukan CCP sejak akhir 1920-an hingga awal 1930-an.

CCP secara bertahap menguasai wilayah-wilayah seperti Kiangsi, Hupei, dan Fujian, yang memungkinkan kelompok ini untuk membangun struktur dan administrasi pemerintahan serta basis militer yang lebih terorganisir. Penguasaan wilayah ini menjadi batu loncatan penting bagi transformasi CCP dari gerakan pemberontak menjadi entitas politik yang menjalankan fungsi kenegaraan. Keberhasilan CCP mempertahankan kontrol di wilayah pedesaan juga mencerminkan kemampuan dalam memobilisasi dukungan sosial dan menciptakan bentuk pemerintahan alternatif di luar kendali pemerintah KMT (Lin, 2012).

Transformasi ini semakin jelas dengan deklarasi berdirinya *Chinese Soviet Republic* (CSR) pada 1931. CSR dilengkapi dengan konstitusi, kabinet,

serta departemen-departemen yang menjalankan fungsi kenegaraan seperti pertahanan, keuangan, dan urusan luar negeri. Laporan *Lytton Commission* (1932), mengakui bahwa CCP telah membentuk sistem pemerintahan, hukum, dan administrasi sendiri, serta menyebutnya sebagai “*actual rival*” bagi pemerintah KMT di Nanjing. Meskipun tidak diakui sebagai negara berdaulat, struktur yang dibangun oleh CCP telah memenuhi kriteria klasik dalam hukum internasional untuk status “*belligerent*”, yaitu penguasaan wilayah, pemerintahan yang berfungsi, dan kekuatan bersenjata yang terorganisasi (Gazzini, 1996).

Upaya KMT untuk menghancurkan basis kekuatan CCP melalui serangkaian kampanye pengepungan hampir menghancurkan CSR, sehingga memaksa CCP melakukan *Long March* pada 1934-1935. Meskipun merupakan langkah yang bersifat defensif, peristiwa ini justru menjadi momentum penting bagi konsolidasi ideologis dan reorganisasi militer CCP. Pengalaman ini memperkuat kepemimpinan internal dan meningkatkan legitimasi politik CCP di kalangan masyarakat, sekaligus membentuk identitas perjuangan yang kelak berkontribusi pada keberhasilannya dalam fase akhir perang saudara (Lin, 2012).

Kemenangan CCP pada 1949 yang menghasilkan dua entitas politik yang terpisah secara geografis dan ideologis, tanpa mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat final. Kondisi ini mencerminkan karakter perang saudara yang berakhir tanpa perjanjian damai, sehingga konflik kedaulatan bersifat

terbuka dan berkelanjutan dalam perpektif hukum internasional (Gazzini, 1996). Tidak adanya keputusan yang menutup konflik secara resmi, menciptakan ambiguitas status dan memungkinkan kedua pemerintahan mempertahankan klaim sebagai satu-satunya entitas sah yang mewakili seluruh wilayah China. Dalam hal ini, separasi 1949 bukanlah pemisahan yang disepakati, melainkan hasil perang yang meninggalkan sengketa. Taiwan masih beroperasi secara *de facto* dalam menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan hingga saat ini, meskipun status hukumnya tetap diperdebatkan dalam sistem internasional.

2.1.2. Dinamika Kontemporer Hubungan Lintas Selat Taiwan

Pada dekade 1950-an, hubungan lintas Selat Taiwan mengalami perubahan yang cukup signifikan dari konflik internal pasca-perang saudara menjadi dinamika keamanan yang terproyeksikan ke tingkat regional dan internasional. Konsolidasi PRC di daratan dan keberlanjutan ROC di Taiwan menjadikan Selat Taiwan sebagai ruang utama upaya klaim kedaulatan yang saling bertentangan. Bagi China, isu Taiwan pada fase awal ini tidak dipahami sebagai hubungan antarnegara, melainkan sebagai kelanjutan konflik internal yang belum terselesaikan, sehingga reunifikasi diposisikan sebagai bagian dari proses konsolidasi negara pasca-1949 (Sheng, 2008).

Dinamika tersebut tercermin secara nyata dalam *First* (1954–1955) dan *Second Taiwan Strait Crises* (1958), yang menandai eskalasi militer

paling signifikan dalam fase awal hubungan lintas Selat. Keputusan Mao Zedong untuk melancarkan penembakan artileri terhadap wilayah Jinmen dan Mazu tidak semata didorong oleh pertimbangan militer, tetapi juga oleh faktor psikologis dan historis. *Victim mentality* yang berakar pada pengalaman historis China terkait intervensi asing dan “abad penghinaan” membentuk persepsi Mao terhadap tekanan eksternal, sekaligus meningkatkan dorongan untuk menegaskan kedaulatan nasional melalui tindakan militer (Yang & Mao, 2016). Krisis Selat Taiwan menjadi instrumen pernyataan politik mengenai legitimasi dan otoritas negara China.

Eskalasi militer pada periode 1950-an relatif terbatas secara geografis dan temporal, namun pola interaksi yang terbentuk memiliki dampak jangka panjang terhadap hubungan lintas Selat. Sejak awal, pendekatan China terhadap Taiwan menunjukkan paradoks antara fleksibilitas taktis dan keteguhan prinsip yang menunjukkan bahwa krisis Selat Taiwan merupakan bagian dari kalkulasi kebijakan luar negeri China yang lebih luas (Sheng, 2008). Bentuk interaksi dapat berubah, dari tekanan militer hingga stabilitas terbatas, namun prinsip kedaulatan dan integritas teritorial tetap menjadi dasar kebijakan yang tidak bergeser. Pola ini kemudian membentuk kerangka dasar hubungan lintas selat pada dekade-dekade berikutnya, ditandai dengan eskalasi dan de-eskalasi yang terjadi secara berulang tanpa menyentuh penyelesaian substantif atas isu kedaulatan.

Pada periode berikutnya, dinamika lintas selat berkembang melalui penyesuaian strategi dan instrumen kebijakan seiring pergeseran struktur sistem internasional. Isu Taiwan semakin terintegrasi ke dalam kalkulasi strategis kekuatan besar, menjadikannya sebagai titik paling sensitif dalam hubungan China dengan Amerika Serikat. Salah satu contohnya terlihat pasca peristiwa normalisasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan China pada akhir 1970-an. Peristiwa ini telah mengubah posisi Taiwan dalam sistem internasional secara fundamental. Taiwan kehilangan banyak pengakuan internasional dan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun hal ini tidak semata-mata mengakhiri konflik lintas Selat, melainkan menimbulkan pergeseran dari konfrontasi militer terbuka menuju kontestasi legitimasi dan pengaruh politik. Dengan kondisi tekanan tersebut, Taiwan semakin terdorong untuk melakukan konsolidasi kekuatan internalnya, sementara China tetap konsisten atas klaim kedaulatannya dan mulai melakukan kombinasi tekanan politik dengan pendekatan pragmatis demi menjaga stabilitas regional yang mendukung agenda pembangunan domestik (Friedman, 2007).

Dalam hal perubahan struktur sistem internasional tersebut, hubungan lintas Selat Taiwan pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an mengalami relaksasi ketegangan secara terbatas yang ditopang oleh meningkatnya interaksi ekonomi dan komunikasi tidak langsung. Meskipun China dan Taiwan tetap berada dalam sengketa kedaulatan yang belum terselesaikan,

kedua pihak secara de facto terlibat dalam hubungan ekonomi melalui perdagangan, arus modal dan investasi, produksi lintas batas, serta berkembangnya interdependensi ekonomi. Interaksi ini menciptakan mekanisme pengelolaan konflik yang menekan konfrontasi militer secara langsung, sekaligus memungkinkan masing-masing pihak mempertahankan posisi politik dasarnya.

Perubahan paling krusial dalam dinamika lintas selat terjadi seiring dengan proses demokratisasi Taiwan pada akhir 1980-an dan awal 1990-an. Transformasi politik domestik Taiwan telah mengubah karakter hubungan lintas selat dari sekadar sengketa kedaulatan menjadi konflik yang juga melibatkan isu legitimasi pemerintahan dan identitas politik (Jacobs & Liu, 2007). Konflik yang sebelumnya dipahami sebagai kelanjutan perang saudara secara bertahap memasuki dimensi baru berupa tantangan terhadap narasi klaim kedaulatan dan representasi politik negara China.

Third Taiwan Strait Crises (1995-1996) merupakan manifestasi awal dari perubahan struktural tersebut. Berbeda dengan Krisis Selat Taiwan pada dekade 1950-an yang berlangsung dalam situasi Perang Dingin awal dan konflik bersenjata yang lebih terbuka, krisis 1995-1996 terjadi ketika Taiwan telah berkembang menjadi entitas politik yang semakin demokratis dan berupaya memperluas ruang internasionalnya. Bagi China, krisis ini berfungsi sebagai bentuk *coercive signaling* untuk menegaskan klaim kedaulatan dan membatasi manuver politik Taiwan, tanpa mendorong eskalasi militer masif

yang berisiko memicu keterlibatan langsung Amerika Serikat (Cabestan, 1995).

Dalam kerangka kebijakan warisan Deng Xiaoping, pendekatan China terhadap Taiwan pada periode ini lebih menekankan stabilitas eksternal dan penundaan penyelesaian isu Taiwan demi mendukung prioritas pembangunan domestik (Overholt, 1996). Namun, keberhasilan reformasi ekonomi dan meningkatnya kapabilitas nasional China sepanjang 1990-an justru menciptakan tekanan internal untuk bersikap lebih tegas terhadap Taiwan, terutama pada era kepemimpinan Jiang Zemin.

Di sisi lain, perubahan identitas politik Taiwan di bawah Lee Teng-hui semakin menjauh dari narasi "*One China*" yang dipersepsikan oleh pemerintah Beijing sebagai ancaman struktural terhadap dasar legitimasi negara China, sehingga ruang kompromi lintas selat semakin menyempit. Kondisi ini membentuk dilema keamanan jangka panjang bagi Taiwan, dengan kondisi bahwa ketimpangan kekuatan dengan China semakin menguat sementara opsi *deterrence* yang tersedia tetap terbatas, sebagaimana telah terlihat sejak awal abad ke-21 (Tung, 2005).

Pasca krisis 1995-1996, dinamika lintas selat memasuki fase institusionalisasi pola interaksi baru sehingga eskalasi militer beralih fungsi menjadi salah satu instrumen tekanan politik yang terkelola. China menyadari keterbatasan militernya dalam menghadapi potensi keterlibatan langsung Amerika Serikat, sekaligus menilai bahwa tekanan militer terbatas dapat

efektif memengaruhi kalkulasi politik Taiwan dan aktor eksternal. Sementara itu, Taiwan semakin menyadari bahwa keberlangsungan keamanannya sangat bergantung pada kemampuan mengelola hubungan strategis dengan aktor eksternal, khususnya Amerika Serikat, dalam kerangka *deterrence* yang bersifat rapuh dan situasional (Ross, 1996). Kesadaran akan keterbatasan struktural inilah yang secara bertahap membentuk pola respons Taiwan yang cenderung menghindari pilihan ekstrem antara konfrontasi terbuka dan akomodasi penuh.

Dengan kondisi kerentanan hubungan lintas selat, kepemimpinan Chen Shui-bian merepresentasikan kesinambungan dari kerangka identitas dan status quo yang telah dibangun sebelumnya, namun dijalankan dalam lingkungan demokrasi kompetitif dan batasan eksternal yang semakin ketat. Gaya politik Chen yang lebih ekspresif tercermin dalam pernyataan-pernyataan mengenai kemerdekaan bersifat ambigu dan situasional, yang lebih berfungsi sebagai komunikasi politik domestik, bukan sebagai sinyal kebijakan menuju deklarasi kemerdekaan nyata (Sullivan & Lowe, 2010). Pada saat yang sama, penggunaan bahasa dan simbol identitas Taiwan berperan sebagai instrumen *nation-building* internal yang meningkatkan sensitivitas Beijing, meskipun tidak disertai langkah institusional yang secara eksplisit menantang kerangka *One China* (Cheng, 2006).

Relaksasi ketegangan pada fase ini tidak merepresentasikan rekonsiliasi politik ataupun penyelesaian sengketa kedaulatan, melainkan

berfungsi sebagai bentuk penanggulangan konflik dalam kerangka status quo yang rentan. (Cho, 2005). Relaksasi ini tercermin dalam partisipasi kedua pihak dalam keanggotaan *World Trade Organization* (WTO) pada awal 2000-an, meskipun Taiwan bergabung dengan status khusus sebagai *Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu*. Partisipasi ini memungkinkan terjalinnya hubungan perdagangan yang terinstitusionalisasi di bawah kerangka aturan internasional, tanpa harus melakukan pengakuan kedaulatan secara konvensional.

Peningkatan arus investasi Taiwan ke China daratan dan ketergantungan ekonomi yang bersifat asimetris menciptakan insentif bersama untuk menahan benturan militer, sekaligus menjadikan stabilitas lintas selat sebagai prasyarat bagi kepentingan ekonomi masing-masing pihak (Cho, 2005). Namun demikian, stabilitas yang terbentuk tetap bersifat rapuh dan instrumental, karena tidak menghilangkan konflik mendasar terkait kedaulatan dan legitimasi politik.

China di bawah kepemimpinan Hu Jintao merespons dinamika tersebut dengan cenderung menahan eskalasi militer sambil memperluas interdependensi ekonomi dan tekanan politik selektif yang mencerminkan upaya untuk mengelola risiko konflik tanpa mengorbankan klaim kedaulatan fundamentalnya (Friedman, 2007). Interaksi antara retorika politik Taiwan dan strategi manajemen konflik China pada periode ini telah menghasilkan

kondisi paradoks yang relatif stabil secara militer, namun rentan terhadap ketegangan simbolis dan interpretatif.

Penyesuaian strategi Taiwan semakin terlihat pada era kepemimpinan Ma Ying-jeou, ketika pengelolaan hubungan lintas selat secara eksplisit diarahkan pada stabilitas politik dan ekonomi sebagai sarana utama menurunkan risiko eskalasi konflik. Pendekatan *engagement* yang menekankan peningkatan interaksi ekonomi dan penahanan diri strategis merefleksikan kesadaran terhadap keterbatasan opsi *deterrence* konvensional di tengah ketimpangan kekuatan yang semakin besar dengan China (Smith, 2010). Meskipun strategi tersebut berkontribusi pada terciptanya ketenangan jangka pendek, ancaman struktural dari China tidak mengalami perubahan yang substantif, sehingga stabilitas yang dihasilkan bersifat kondisional dan sangat bergantung pada kalkulasi politik kedua belah pihak.

Kebijakan Ma dapat dipahami sebagai bentuk manajemen risiko yang secara tidak langsung meningkatkan ketergantungan asimetris Taiwan terhadap China serta menyempitkan ruang manuver strategis, termasuk dalam relasinya dengan Amerika Serikat (Chen, 2013). Pola penyesuaian ini mencerminkan konseptualisasi dari strategi *hedging*, yakni upaya Taiwan untuk secara bersamaan mempertahankan *engagement* dengan China sekaligus menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat guna menghindari eskalasi langsung tanpa kehilangan otonomi strategisnya (Wu, 2016)

Transformasi vital dalam dinamika lintas selat tidak hanya ditentukan oleh pergantian kepemimpinan di Taiwan, tetapi juga oleh cara pengelolaan dan legitimasi stabilitas, yang kemudian mengalami erosi secara bertahap. Penguatan strategi stabilisasi lintas selat mencapai puncaknya pada era kepemimpinan Ma Ying-jeou, yang memperoleh legitimasi politik domestik kuat melalui Pemilu Taiwan 2012. Pemilu tersebut tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin, melainkan sebagai mandat implisit terhadap keberlanjutan kebijakan lintas selat berbasis status quo dan Konsensus 1992 (Ger, 2012).

Kemenangan kembali Ma mencerminkan preferensi mayoritas pemilih terhadap stabilitas ekonomi dan prediktabilitas hubungan dengan Beijing, sekaligus menegaskan bahwa kebijakan lintas selat pada periode ini lebih ditentukan oleh kalkulasi risiko eskalasi konflik dibandingkan orientasi ideologis semata. Hubungan lintas selat semakin mengandalkan interdependensi ekonomi serta *diplomatic truce* sebagai instrumen utama pengelolaan konflik. Namun demikian, stabilitas yang tercipta bersifat sementara dan sangat bergantung pada keberlanjutan landasan politik bersama, khususnya penerimaan terhadap Konsensus 1992 sebagai simbol kredibilitas dan mekanisme *reassurance* bagi Beijing maupun aktor ekonomi lintas selat (Ger, 2012).

Ketergantungan stabilitas lintas selat pada pola politik tersebut menjadi semakin terlihat rapuh ketika Pemilu 2016 menghasilkan

kemenangan DPP dan Tsai Ing-wen. Meskipun pemerintahan Tsai tidak secara eksplisit menolak Konsensus 1992, sikap ambigu tersebut membentuk persepsi Beijing yang menilai sikap tersebut sebagai tindakan disintegrasi terhadap fondasi politik yang selama ini menopang hubungan keduanya. Persepsi ini memicu perubahan signifikan dalam perilaku China, mulai dari pembekuan dialog resmi hingga peningkatan tekanan diplomatik dan militer terhadap Taiwan (Wu, 2016). Pergeseran ini menandai transisi hubungan lintas selat dari fase konsolidasi stabilitas menuju fase ketidakpastian struktural, ditandai dengan kembalinya dinamika politik domestik menjadi variabel sentral dalam kalkulasi strategis Beijing. Dengan seluruh fluktuasi tersebut, memburuknya hubungan lintas selat pasca 2016 tidak dapat dipahami hanya sebagai konsekuensi dari pergantian rezim, tetapi sebagai rapuhnya mekanisme stabilisasi politik sebelumnya yang memungkinkan perpecahan konflik kapan saja secara situasional.

Dalam lingkungan strategis yang semakin memburuk, kebijakan Taiwan di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen menunjukkan pergeseran fokus dari manajemen stabilitas berbasis *engagement* menuju penguatan kapasitas pertahanan berbasis pertahanan defensif. Berbeda dari pendekatan Ma yang menempatkan stabilitas ekonomi sebagai instrumen keamanan utama, pemerintahan Tsai memprioritaskan peningkatan ketahanan militer melalui pengembangan strategi pertahanan asimetris dan penguatan industri pertahanan domestik. Perubahan ini tidak mencerminkan orientasi separatis

atau provokatif, melainkan merupakan adaptasi defensif terhadap perubahan perilaku China yang semakin koersif (Wu, 2018). Dengan kondisi ketimpangan kekuatan yang semakin tajam, kebijakan pertahanan Taiwan pada era ini bertujuan menaikkan biaya peluang agresi sekaligus mempertahankan perjuangan negara, tanpa mendorong eskalasi terbuka atau memutus hubungan keamanan dengan Amerika Serikat.

Perkembangan tersebut semakin diperkuat oleh pergeseran strategi China di bawah kepemimpinan Xi Jinping, ketika isu Taiwan secara eksplisit diposisikan sebagai inti kepentingan nasional dan simbol kebangkitan China di tingkat internasional (Blackwill & Zelikow, 2021). Di bawah Xi, pendekatan China terhadap Taiwan bergerak dari pola *dual-track* menuju tekanan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Intensifikasi aktivitas militer yang bersifat rutin, marginalisasi diplomatik Taiwan, serta penggunaan instrumen ekonomi dan psikologis menunjukkan bahwa hubungan lintas selat tidak lagi dikelola semata untuk stabilitas jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk menciptakan kondisi reunifikasi yang semakin menguntungkan. Pendekatan ini secara signifikan memperkuat persepsi ancaman struktural di Taiwan sekaligus meningkatkan sensitivitas keamanan kawasan.

Memasuki periode pemerintahan Tsai Ing-wen (2016-2024) dan dilanjutkan oleh Lai Ching-te (2024-kini), hubungan lintas selat kembali berada dalam fase ketegangan tinggi. Penolakan pemerintahan DPP terhadap

Konsensus 1992, serta penekanan pada retorika status quo yang dipersepsikan Beijing sebagai kecenderungan pro-kedaulatan, memicu respons koersif yang semakin intensif. Pola ini tercermin secara nyata dalam peningkatan aktivitas militer China di sekitar Taiwan, termasuk latihan gabungan berskala besar yang dilakukan secara rutin dan sering kali tanpa pemberitahuan awal.

Pada April 2025, PLA meluncurkan latihan militer mendadak yang melibatkan sekitar 71 pesawat tempur dan 19 kapal perang di sekitar Taiwan, dengan skenario patroli kesiapan tempur dan simulasi blokade maritim (The Guardian, 2025). Dinamika ini menunjukkan pola berulang bahwa setiap upaya yang dilakukan Taiwan dalam memperluas ruang politik dan otonomi strategisnya secara konsisten beriringan dengan peningkatan tekanan dari China. Pada 29-30 Desember 2025, China kembali menggelar latihan besar yang dilabeli sebagai "*Justice Mission 2025*" dengan mencakup operasi udara, laut, dan rudal di sekitar pulau Taiwan (Al Jazeera, 2025). Taipei mempersepsikan aktivitas ini sebagai simulasi tekanan militer terpadu dan Amerika Serikat menilai sebagai tindakan yang meningkatkan ketegangan secara tidak perlu.

Dinamika kontemporer hubungan lintas Selat Taiwan dapat dipahami sebagai hasil evolusi panjang yang menghubungkan warisan konflik historis, perubahan politik domestik dan internasional. Pada fase awal, ancaman dipersepsikan bersumber dari agresi militer langsung dari China yang memandang konflik sebagai kelanjutan perang saudara. Bentuk ancaman hadir

dalam konfrontasi terbuka melalui penggunaan kekuatan militer. Hubungan tersebut tidak pernah bergerak menuju resolusi akhir, melainkan membentuk siklus stabilisasi dan eskalasi yang berulang hingga saat ini. Seiring perkembangan waktu dan proses demokratisasi Taiwan, ketegangan berkembang dan mulai memasuki ranah legitimasi politik dan ruang internasional. Karakter ancaman tidak lagi berupa konfrontasi terbuka, tetapi melalui instrumen politik dan diplomatik yang lebih kompleks. Narasi *One China* dan Krisis Selat Taiwan Ketiga merupakan manifestasi ancaman berupa tekanan diplomatik dan *coercive signaling* terhadap Taiwan. Memasuki periode 2020-2024, ancaman dipersepsikan menjadi semakin kompleks dan multidimensional, ditandai dengan peningkatan kapabilitas militer China serta peningkatan aktivitas militer di sekitar Taiwan yang mencerminkan indikasi niat agresif. Pola ini membentuk konstruksi struktural dalam persepsi ancaman Taiwan sekaligus mendorong penyesuaian strategi keamanannya.

Peningkatan tekanan militer China terhadap Taiwan tidak dapat dilepaskan dari pola perilaku strategis China di kawasan dengan cakupan yang lebih luas, khususnya Laut China Selatan. Sejak tahun 2012, ketegangan meningkat melalui insiden seperti *Scarborough Shoal standoff* antara China dan Filipina, diikuti dengan percepatan pembangunan melalui reklamasi dan militerisasi pulau buatan di Kepulauan Spratly yang mencakup pembangunan landasan pacu, fasilitas militer, dan sistem pertahanan udara (Xu et al., 2024). Aktivitas berlanjut pada 2014 melalui penempatan rig minyak di wilayah

sengketa serta pengerahan kapal-kapal untuk melindungi kepentingan tersebut. Pada 2016, China meningkatkan postur militernya dengan penempatan sistem rudal di Kepulauan Paracel serta mengabaikan putusan *Permanent Court of Arbitration* yang menolak klaim *nine-dash line* China. Pengabaian dilakukan dalam bentuk intensifikasi patroli militer dan kehadiran *China Coast Guard* sebagai instrumen “*gray zone*” (CSIS ChinaPower, 2024). Memasuki periode 2020, China semakin agresif melalui peningkatan patroli laut dan udara, pembangunan fasilitas tambahan di wilayah sengketa, serta tindakan koersif seperti penabrakan dan penenggelaman kapal nelayan negara lain. Pada 2021-2023, aktivitas tersebut semakin meningkat melalui pengerahan ratusan kapal di wilayah sengketa, perluasan klaim teritorial melalui peta resmi, serta peningkatan anggaran dan kehadiran militer di kawasan. Hingga 2024, benturan langsung seperti insiden *Second Thomas Shoal* menunjukkan intensifikasi konflik di lapangan. Pola ini menunjukkan konsistensi aktivitas koersif China dalam memproyeksikan kekuatan maritimnya. Hal ini relevan dalam membentuk persepsi ancaman Taiwan, khususnya terkait dimensi niat agresif dan kapabilitas ofensif dalam kerangka *Balance of Threat*.

Dengan demikian, evolusi dinamika lintas selat mencerminkan perkembangan persepsi ancaman yang sinkron dengan indikator dalam kerangka *Balance of Threat*. Identifikasi ancaman Taiwan terhadap China tidak bersifat statis, melainkan bergerak mengikuti perubahan lingkungan

keamanan kawasan setiap periode, termasuk dinamika perilaku eksternal China di kawasan seperti Laut China Selatan. Dinamika tersebut tercermin pada variasi indikator ancaman yang menjadi dominan misalnya dalam bentuk peningkatan kapasitas nasional dan militer, kedekatan geografis, maupun intensitas niat agresif yang berbeda pada setiap fase. Perbedaan konfigurasi mengubah karakter ancaman yang membentuk penyesuaian respons kebijakan keamanan Taiwan.

2.2. Orientasi Keamanan Kedua Aktor dalam Dinamika Hubungan Lintas Selat

Dalam sistem internasional, posisi suatu aktor tidak hanya ditentukan dari keberadaannya sebagai negara atau entitas politik, tetapi juga melalui kapasitas, legitimasi, serta peran yang dapat dijalankannya dalam struktur global. Sistem internasional pada dasarnya merupakan sebuah arena yang terdiri dari aktor-aktor dengan kemampuan, pengaruh politik, dan kekuatan yang dominan memiliki ruang yang lebih luas dalam menentukan arah interaksi dan bentuk relasi yang bersifat hierarkis (Wang & Vangeli, 2016). Perbedaan posisi dan kapasitas struktural dapat menentukan ruang kerentanan suatu aktor dalam bertindak, memengaruhi, ataupun memperjuangkan kepentingannya dalam tatanan global.

Kedaulatan dan legitimasi sebagai prinsip fundamental dalam sistem internasional menjadi landasan utama yang menentukan posisi suatu aktor. Namun dalam praktiknya, kedaulatan tidak selalu dimaknai sebagai hak mutlak dan setara bagi seluruh aktor. Dalam kondisi tertentu, kedudukan suatu aktor dapat menjadi

objek perdebatan, negosiasi, maupun pembatasan oleh aktor lain yang memiliki posisi dominan dan pengaruh lebih besar dalam sistem internasional (Ohlendorf, 2014; Wang & Vangeli, 2016) Dinamika tersebut tercermin dalam hubungan antara China dan Taiwan, dengan perbedaan status, pengakuan, dan klaim kedaulatan sebagai pembentuk ruang interaksi abu-abu. Situasi tersebut menciptakan ambiguitas, apabila suatu aktor yang telah memiliki kapasitas politik, ekonomi, dan keamanan yang terstruktur, namun berada dalam keterbatasan untuk memperoleh pengakuan ruang gerak internasional. Oleh karena itu, posisi suatu aktor dalam sistem internasional kerap ditentukan oleh kombinasi antara kapasitas internal dan pengakuan eksternal.

Dinamika dalam sistem internasional juga dipengaruhi oleh kontestasi kepemimpinan dan perubahan distribusi kekuatan global. Pergeseran ini berdampak pada cara aktor-aktor mengambil peran, baik sebagai penentu aturan (*rule-maker*) maupun sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap aturan yang ada (*rule-taker*) (Wang & Vangeli, 2016). Dalam dinamika tersebut, isu-isu tertentu tidak hanya dipahami sebagai bagian dari pola interaksi bilateral, tetapi juga sebagai upaya mempertahankan atau menegosiasikan posisi dalam struktur internasional yang terus berubah. Di sisi lain, interaksi dalam sistem internasional tidak selalu bersifat konfrontatif. Dalam beberapa kasus, hubungan antaraktor berkembang dalam bentuk saling ketergantungan yang kompleks, baik di bidang ekonomi, politik, maupun keamanan. Interdependensi ini dapat memperkuat stabilitas tertentu, namun pada saat yang bersamaan juga menciptakan kerentanan baru yang memengaruhi perhitungan strategis masing-masing aktor (Schriver & Stokes, 2008). Pola interaksi ini juga

terlihat dalam hubungan lintas selat yang berkontribusi pada stabilitas sekaligus kerentanan strategis. Dengan demikian, pembahasan posisi kedua aktor dalam sistem internasional yang bersifat dinamis menjadi penting untuk memahami proses penyesuaian dan pembentukan relasi, kepentingan, serta dinamika kekuasaan seiring dengan perubahan konteks regional dan global.

2.2.1. Taiwan dalam Kalkulasi Strategis China

China merupakan aktor dengan kapabilitas material dan politik yang terus mengalami peningkatan sebagai upaya mempertahankan dan memperluas pengaruh strategisnya dalam sistem internasional, termasuk Asia Pasifik. Sikap ini tercermin dalam retorika kebijakan luar negeri dan praktik keamanan militer yang menegaskan kepentingan strategis China di wilayah sekitarnya (Finkelstein, 2007). Dalam kerangka tersebut, Taiwan menempati posisi fundamental sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedaulatan nasional, berdasarkan prinsip *One China* dalam Konsensus 1992. Dinamika di sekitar Selat Taiwan tidak dipahami sebagai isu yang menyangkut intervensi dan integritas wilayah, tetapi sebagai isu domestik yang memiliki implikasi terhadap stabilitas dan legitimasi negara. Selain itu, Resolusi 2758 Majelis Umum PBB juga menegaskan legitimasi Beijing bahwa hanya ada satu China di dunia dan pemerintahan RRC sebagai satu-satunya pemerintahan sah. Pemahaman ini berakar pada sudut pandang China terhadap isu Taiwan sebagai kelanjutan dari konflik internal yang belum terselesaikan pasca 1949. Oleh karena itu, agenda reunifikasi didefinisikan sebagai rangkaian proses

konsolidasi negara dalam upaya pembentukan kedaulatan yang lebih menyeluruh (Sheng, 2008).

China juga memiliki persepsi bahwa intensifikasi militer di sekitar Taiwan merupakan salah satu instrumen untuk menegaskan klaim kedaulatan dan mencegah perubahan status quo yang dapat merugikan kepentingan nasional China. Peningkatan frekuensi dan kompleksitas operasi militer, tidak diarahkan pada eskalasi konflik terbuka, melainkan pada pembentukan kawasan yang memungkinkan China mempertahankan kontrol dan kredibilitasnya (Trent, 2020). Kehadiran aktivitas militer di wilayah sekitar Taiwan menjadi bentuk proyeksi kekuatan yang sah dalam kerangka kedaulatan nasional. Sebagai salah satu aktor dengan pengaruh dominan dalam sistem internasional, strategi intensifikasi China berkaitan erat dengan orientasi strategis jangka panjang dalam menghadapi dinamika kekuatan regional dan global. Modernisasi dan penggunaan kekuatan militer mencerminkan upaya China untuk mengamankan *core interest* serta mengantisipasi potensi keterlibatan aktor eksternal dalam isu Taiwan (Finkelstein, 2007). Taiwan menjadi titik sensitif yang berpotensi memengaruhi kedudukan China dalam struktur keamanan kawasan Asia Timur.

Selain pada dimensi keamanan, pendekatan China terhadap Taiwan juga berkaitan dengan upaya mempertahankan konsisten normatif dan kepemimpinan China dalam sistem internasional. China berupaya menegaskan

statusnya sebagai entitas dengan kapasitas untuk menyusun dan menerapkan norma terkait kedaulatan dan non-intervensi (Wang & Vangeli, 2016). Perspektif China memproyeksikan tindakan di sekitar Taiwan sebagai upaya pertahanan kedaulatan nasional yang sah menurut China, dan menjadi isyarat kepada komunitas internasional mengenai batas-batas perilaku yang tidak dapat dinegosiasikan. Dengan demikian, posisi strategis China terhadap Taiwan dihasilkan oleh kombinasi pemaknaan kedaulatan berdasarkan sejarah, urgensi konsolidasi negara, serta perhitungan risiko dalam sistem internasional yang kompetitif.

2.2.2. Kalkulasi Keamanan Taiwan dalam Keterbatasan Diplomatik

Taiwan memiliki interpretasi mandiri mengenai kedaulatan yang bertentangan dengan klaim China. Eksistensi Taiwan sebagai entitas politik diklaim berdasarkan faktor-faktor seperti pemerintahan yang efektif, wilayah, penduduk, serta kapasitas pengambilan keputusan otonom. Perspektif ini terbentuk seiring dengan menguatnya sistem politik demokratis dan rasionalisasi kebijakan luar negeri Taiwan yang semakin realistis dalam mempertahankan keberlangsungan entitas politiknya di tengah keterbatasan pengakuan internasional (Rigger, 2006). Oleh karena itu, isu kedaulatan tidak semata dipahami Taiwan sebagai klaim idealis, melainkan sebagai realita politik yang dijalankan secara *de facto* melalui praktik pemerintahan dan interaksi internasional. Pandangan yang secara langsung berseberangan

dengan pendekatan China telah menciptakan perbedaan mendasar dalam pemaknaan status politik Taiwan di tingkat internasional (Ohlendorf, 2014).

Posisi Taiwan juga dihadapkan pada keterbatasan struktural dalam sistem internasional, terutama terkait minimnya pengakuan *de jure* sebagai negara berdaulat. Prinsip *One China* yang menjadi landasan utama hubungan diplomatik banyak negara yang membatasi ruang Taiwan untuk memperoleh pengakuan resmi serta berpartisipasi secara penuh dalam organisasi internasional. Realitas ini menempatkan Taiwan dalam situasi ambigu, dengan kapasitas negara dan praktik pemerintahan yang berjalan secara relatif efektif, tetapi status hukumnya dalam tatanan internasional tetap diperdebatkan dan dinegosiasikan (Glaser et al., 2020). Taiwan kerap berada dalam posisi yang rentan secara diplomatik dan harus melakukan penyesuaian dengan struktur internasional yang tidak sepenuhnya mengakomodasi keberadaannya sebagai entitas politik yang berdiri sendiri.

Taiwan mengembangkan pola hubungan eksternal yang bersifat fleksibel dan informal dengan komunitas internasional sebagai upaya dalam menghadapi keterbatasan struktural. Meskipun tidak memiliki banyak mitra diplomatik resmi, Taiwan tetap menjalin hubungan strategis dengan sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, serta negara-negara lain. Interaksi ini terwujud melalui kerja sama ekonomi, pertukaran teknologi, dukungan keamanan, serta koneksi politik yang tidak selalu dilembagakan secara formal, tetapi tetap dengan pertimbangan kepentingan-kepentingan strategis (Glaser et

al., 2020). Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, kerja sama nyata terlihat melalui mekanisme penjualan alutsista dan dukungan pertahanan berdasarkan kerangka *Taiwan Relations Act*, peningkatan dialog keamanan melalui *American Institute in Taiwan*, serta inisiatif kerja sama ekonomi seperti *US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade* yang mencakup isu rantai pasok dan teknologi strategis. Sementara itu, hubungan Jepang dengan Taiwan berjalan dalam bentuk kolaborasi pengembangan di bidang teknologi dan industri semikonduktor melalui pembukaan pabrik produksi *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited* (TSMC), koordinasi dan dukungan keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, serta kerja sama ekonomi melalui forum bilateral yang memfasilitasi investasi dan inovasi teknologi. Strategi ini memberikan kesempatan bagi Taiwan untuk mempertahankan keterhubungan dengan dinamika internasional dan tetap mengelola ruang gerak eksternalnya, meskipun berada dalam batasan pengakuan hukum yang ketat.

Interaksi Taiwan dengan aktor-aktor dalam sistem internasional tidak sepenuhnya terjalin dalam pola relasi yang kooperatif maupun konfrontatif, namun berada dalam spektrum yang fluktuatif tergantung pada isu dan kepentingan yang terlibat. Contohnya bagi China, Taiwan dapat dipersepsikan sebagai tantangan politik dan keamanan, sekaligus pihak yang diposisikan sebagai mitra ekonomi (Tubilewicz, 2012). Pola relasi semacam ini mencerminkan posisi Taiwan yang tidak sepenuhnya terintegrasi, tetapi juga

tidak sepenuhnya terisolasi dalam tatanan internasional. Ambiguitas tersebut semakin diperkuat oleh karakter hubungan lintas selat yang selalu berisi dengan kontradiksi. Kondisi ini menempatkan Taiwan dalam dilema berkelanjutan antara stabilitas ekonomi dan keamanan politik yang tidak selalu berjalan seiringan. Selain itu, dukungan keamanan dan politik dari Amerika Serikat yang umumnya dipandang sebagai jaminan penting bagi keberlangsungan Taiwan, namun pada saat yang bersamaan juga dipahami sebagai relasi yang bersyarat dan penuh perhitungan strategis. Begitu pula relasi dengan Jepang yang dipenuhi keterikatan historis dan kerja sama dalam berbagai bidang, namun tetap terbatas dengan ketidakpastian komitmen dan instabilitas isu.

Perkembangan status Taiwan dalam sistem internasional juga ditopang oleh kapasitas dan dinamika internal yang membentuk cara Taiwan menjalankan posisinya sebagai aktor internasional. Kemajuan Taiwan di bidang teknologi, khususnya dalam industri semikonduktor, memberikan nilai strategis yang tinggi dalam rantai pasok global dan memperkuat posisinya sebagai mitra ekonomi yang sulit diabaikan (Feigenbaum, 2020). Faktor-faktor lain seperti stabilitas ekonomi, sistem politik demokratis, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta kemampuan pertahanan yang berorientasi defensif telah berkontribusi pada pengakuan *de facto* terhadap Taiwan sebagai aktor yang fungsional dalam kontinuitas internasional (Rigger, 2006). Perbedaan orientasi politik dalam negeri dapat menghasilkan interpretasi yang

beragam mengenai strategi terbaik dalam menghadapi keterbatasan pengakuan internasional. DPP cenderung menegaskan identitas politik Taiwan melalui penguatan hubungan dengan Amerika Serikat dan mitra demokratis lainnya, sementara kelompok oposisi seperti KMT dan *Taiwan People's Party* (TPP) menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati terhadap ketergantungan eksternal dan menekankan pentingnya stabilitas lintas selat (Hwang, 2024). Dengan demikian, status Taiwan dalam sistem internasional tidak hanya ditentukan oleh pengakuan formal sepenuhnya, tetapi juga oleh kapasitas internal dan kemampuannya membangun relevansi strategis di tengah keterbatasan yang ada.

2.3. *One China Policy* sebagai Instrumen Penting dalam Dinamika Hubungan Lintas Selat Taiwan

One China Policy secara umum merujuk pada struktur kebijakan yang digunakan oleh negara-negara dan aktor internasional dalam menjalankan hubungan dengan RRC dan ROC. Dalam pengertian paling sederhana, kebijakan ini mencerminkan pengakuan secara sah bahwa hanya terdapat satu entitas “China” dalam hubungan diplomatik, sementara Taiwan ditempatkan dalam posisi yang tidak sepenuhnya diakui sebagai negara berdaulat. Namun dalam praktiknya, pengertian terhadap *One China Policy* diadopsi melalui formulasi dan penafsiran tergantung pada kepentingan masing-masing aktor (Jue, 2006). Lebih jauh, kebijakan Satu China telah menjadi instrumen utama dalam kerangka pembentukan pola interaksi, serta

arah yang menentukan stabilitas di wilayah lintas selat. Kebijakan ini beroperasi melalui penetapan batas normatif dan perilaku aktor-aktor yang terlibat, serta pengelolaan terhadap konflik yang muncul akibat klaim kedaulatan yang saling bertentangan.

Interpretasi yang sangat bergantung pada penggunaan bahasa dan terminologi menimbulkan perbedaan pendekatan aktor yang menggunakannya. Secara umum, istilah *One China Principle* digunakan oleh RRC untuk menegaskan klaim kedaulatan yang bersifat absolut dan tidak dapat dinegosiasikan (Document 12: PRC White Paper "The One China Principle and the Taiwan Issue" 2000). Sebaliknya, istilah *One China Policy* lebih sering digunakan oleh Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk merujuk pada kerangka kebijakan yang bersifat fungsional dan fleksibel dalam mengelola hubungan dengan Beijing dan Taipei (Jue, 2006). Amerika Serikat juga secara sadar membedakan antara istilah *acknowledge* dan *recognize* dalam merespons klaim tersebut, yang memungkinkan AS tidak melanggar komitmen resmi dengan RRC tanpa menerima klaim tersebut sebagai fakta hukum yang mengikat (Hsieh, 2009). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *Principle* dan *Policy* beroperasi pada tingkat konseptual yang berbeda. *One China Principle* diposisikan sebagai fondasi ideologis dan hukum yang menjadi prasyarat mutlak bagi dialog lintas selat menurut Beijing, sementara *One China Policy* berfungsi sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang memungkinkan negara-negara lain mengakui pemerintah RRC sebagai pemerintah China tanpa secara eksplisit mengakui kedaulatan RRC atas Taiwan (Hoover Institution, 2025).

Dalam penerapan hubungan lintas selat, *One China Policy* telah menciptakan stabilitas yang dihasilkan bukan sebagai resolusi konflik, tetapi hasil pengelolaan ketegangan melalui pembatasan perilaku dan ekspektasi aktor-aktor yang terlibat. Tidak adanya kesepakatan tunggal mengenai makna *One China* memungkinkan berbagai pihak mempertahankan interpretasi masing-masing tanpa harus berkonfrontasi secara langsung (Hsieh, 2009). Kebijakan ini memungkinkan negara-negara dan aktor terkait untuk menjalankan hubungan politik, ekonomi, dan sosial lintas selat tanpa harus mencapai kesepakatan mengenai pemegang kedaulatan sah atas Taiwan. Dengan kata lain, perbedaan interpretasi menciptakan ruang ambiguitas yang memungkinkan Taiwan tetap berfungsi sebagai entitas *de facto* dalam sistem internasional. Ambiguitas menjadikan kebijakan ini sebagai instrumen penundaan konflik, sebab stabilitas dicapai bukan melalui penyelesaian substantif, tetapi melalui pengelolaan perbedaan yang belum terselesaikan. Dalam kerangka ini, Taiwan menempati posisi yang secara hukum dan politik bersifat kontradiktif. Posisi ini dikenal dengan konsep *divided state* yang menjelaskan bahwa ROC dan RRC berada di bawah satu klaim *de jure* “China”, tetapi tanpa yurisdiksi satu sama lain (Hsieh, 2009). Posisi ini memberi opsi bagi Taiwan untuk berpartisipasi dalam kerja sama ekonomi dan institusional internasional tanpa harus memperoleh pengakuan kedaulatan formal, sekaligus menjadikan *One China Policy* sebagai kerangka yang menopang keberlangsungan status quo lintas selat.

Pendekatan China mengalami pergeseran menuju penegasan yang lebih ketat atas *One China Principle* pada masa pemerintahan Xi Jinping. Taiwan ditempatkan

sebagai inti dari agenda nasionalisme dan kebangkitan Tiongkok (*national rejuvenation*), sekaligus sebagai garis merah yang tidak dapat dinegosiasikan dalam hubungan lintas selat (Chen, 2015). Berbeda dari periode sebelumnya yang relatif lebih toleran terhadap ambiguitas, era Xi ditandai oleh upaya sistematis untuk menyempitkan ruang interpretasi *One China Principle* versi aktor lain dan menyelaraskannya dengan klaim normatif RRC.

Kebijakan Xi berfokus pada pembangunan fondasi politik jangka panjang yang mengarahkan Taiwan secara bertahap ke reunifikasi dengan tetap mempertahankan stabilitas status quo, tetapi secara struktural semakin menguntungkan Beijing (Huang, 2017). Hal ini tercermin dalam intensifikasi tekanan diplomatik terhadap Taiwan, pembatasan ruang partisipasi internasionalnya, serta pengaitan isu Taiwan dengan agenda keamanan nasional. Sehingga *One China* tidak lagi hanya sebagai kerangka pengelolaan konflik, namun sudah ditekankan menjadi instrumen strategis untuk menegaskan kedaulatan, mengendalikan aktor eksternal, dan mengurangi ambiguitas yang selama ini menopang stabilitas lintas selat.

Selain beroperasi di tingkat internasional, *One China Policy* juga memainkan peran penting dalam politik domestik Taiwan. Interpretasi terhadap *One China* sangat dipengaruhi oleh fragmentasi identitas nasional dan kontestasi politik internal, khususnya antara kelompok yang menekankan identitas ROC dan kelompok yang mendorong identitas Taiwan yang lebih terpisah dari China (Chen, 2015). Pada masa pemerintahan KMT, penerimaan terhadap kerangka *One China* yang lebih fleksibel digunakan sebagai instrumen untuk membangun legitimasi domestik sekaligus

menstabilkan hubungan lintas selat. Dengan demikian, kebijakan lintas Selat Taiwan tidak semata-mata ditentukan oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh kebutuhan elite politik domestik dalam mengelola identitas, legitimasi, dan dukungan politik.

One China Policy belum memiliki definisi tunggal yang disepakati secara universal dan pada praktiknya bersifat subjektif serta kontekstual. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dinamika hubungan lintas Selat Taiwan memerlukan analisis terhadap perspektif dan subjektivitas *One China Policy* yang diterapkan oleh masing-masing aktor yang terlibat, khususnya dalam konteks meningkatnya aktivitas militer China di Selat Taiwan serta transformasi strategi keamanan Taiwan. Meskipun kebijakan ini mampu menciptakan stabilitas jangka pendek, *One China Policy* mengandung kerentanan struktural yang bersumber dari ketimpangan kekuasaan dan perbedaan kepentingan antar aktor. Dalam kerangka normatif Beijing, penggunaan kekuatan tetap dipertahankan sebagai opsi terakhir apabila prinsip *One China* dianggap dilanggar (Document 12: PRC White Paper "The One China Principle and the Taiwan Issue" 2000). Konsekuensinya, stabilitas yang dihasilkan oleh *One China Policy* bersifat rapuh, karena sangat bergantung pada keseimbangan interpretasi, dinamika politik domestik lintas selat, serta kalkulasi strategis aktor-aktor terlibat. Kondisi ini menjelaskan bahwa *One China Policy* dapat menjadi sumber stabilitas, tetapi sekaligus menciptakan potensi eskalasi konflik yang semakin relevan untuk dianalisis dalam konteks keamanan kawasan.